

Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia

Teti Omairah¹, Khairul Amri², Cut Dian Fitri³

Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri

Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Diterima: 18 Desember, 2025 | Revisi: 5 Februari, 2026 | Disetujui: 5 Juni 2026 | Diterbitkan: 6 Juni 2026

ABSTRAK

Pengeluaran pemerintah berperan sebagai instrumen fiskal untuk mendorong pembangunan manusia, namun efektivitasnya di Indonesia masih menunjukkan variasi antar sektor dan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana belanja pemerintah pada fungsi pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan fasilitas umum, serta perlindungan sosial memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Kebaruan studi ini terletak pada analisis kelima jenis belanja secara bersamaan di seluruh provinsi, mengingat penelitian terdahulu cenderung memberikan temuan yang parsial dan tidak konsisten. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif melalui regresi data panel pada 31 provinsi selama periode 2015–2023, dengan sumber data dari Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik, serta pemilihan model estimasi terbaik dilakukan melalui uji Chow dan Hausman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pada fungsi pendidikan dan ekonomi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap IPM, sementara belanja pada fungsi kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, serta perlindungan sosial memberikan pengaruh negatif yang signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas dan kualitas pengelolaan anggaran publik lebih berperan dalam meningkatkan pembangunan manusia dibandingkan sekadar besaran dana yang dialokasikan.

Kata Kunci: Belanja Pemerintah, IPM, Indonesia

The Impact of Government Expenditure on Human Development Index in Indonesia

ABSTRACT

Government expenditure serves as a fiscal instrument to promote human development, yet its effectiveness in Indonesia still varies across sectors and regions. This study aims to analyse the extent to which government expenditure on education, health, the economy, housing and public facilities, as well as social protection, influences the Human Development Index (HDI) in Indonesia. The novelty of this study lies in the simultaneous analysis of these five types of expenditure across all provinces, given that previous research has tended to yield partial and inconsistent findings. The methodology employed is a quantitative approach using panel data regression across 31 provinces during the period 2015–2023, with data sourced from the Ministry of Finance and the Central Statistics Agency, and the selection of the best estimation model was conducted via the Chow and Hausman tests. The results of the study indicate that expenditure on education and economic functions has a significant positive impact on the Human Development Index (HDI), whilst expenditure on health, housing and public facilities, as well as social protection, has a significant negative impact. These findings confirm that the effectiveness and quality of public budget management play a greater role in enhancing human development than the mere amount of funds allocated.

Keywords: Government Spending, HDI, Indonesia.

How to Cite:

Omairah, T., Amri, K., & Fitri, C. D., (2026). Pengaruh Belanja Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *JDEP (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan)*, 9(2), 178-193.

*Corresponding Author:

Email : 220604049@student.ar-raniry.ac.id

Alamat : Jl. Syech Abdurrauf, Banda Aceh



This article is published HYPERLINK
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

PENDAHULUAN

Belanja pemerintah mencakup keseluruhan pengeluaran yang dialokasikan oleh institusi pemerintah di berbagai tingkatan, baik pusat maupun daerah, sebagai wujud pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Belanja pemerintah memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena merupakan instrumen investasi dalam pembangunan manusia (Bandiyono, 2018). Belanja ini mencakup pembiayaan operasional lembaga negara, investasi infrastruktur, subsidi, bantuan sosial, dan program publik lainnya yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesejahteraan, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam konteks pembangunan, tujuan utama negara tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup yang tercermin dalam aspek ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan elemen lainnya. Peningkatan pendapatan riil per kapita menjadi indikator penting dalam pembangunan ekonomi, karena menggambarkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Suatu negara dapat dikatakan berhasil apabila mampu mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, struktur ekonomi yang kuat, serta tingkat kesenjangan pendapatan yang rendah (Sultan et al., 2023).

Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir cenderung stagnan pada kisaran 5% sejak 2014, sehingga target pertumbuhan 6% yang ditetapkan dalam Perpres No. 18 Tahun 2020 belum tercapai. Ketimpangan pertumbuhan antarwilayah menjadi salah satu penyebab, di mana hanya beberapa provinsi seperti Maluku Utara dan Sulawesi Tengah yang mencatat pertumbuhan tinggi (Adhim & Rejekiningsih, 2025) sedangkan wilayah lain belum memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik. Hal tersebut tentu memiliki dampak terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagaimana diketahui bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan akumulasi output dari berbagai sektor di berbagai wilayah Indonesia. Banyaknya wilayah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, menandakan bahwa tingkat output daerah juga rendah, rendahnya tingkat output di daerah, tentu juga berdampak terhadap rendahnya tingkat output nasional dan pertumbuhan ekonomi.

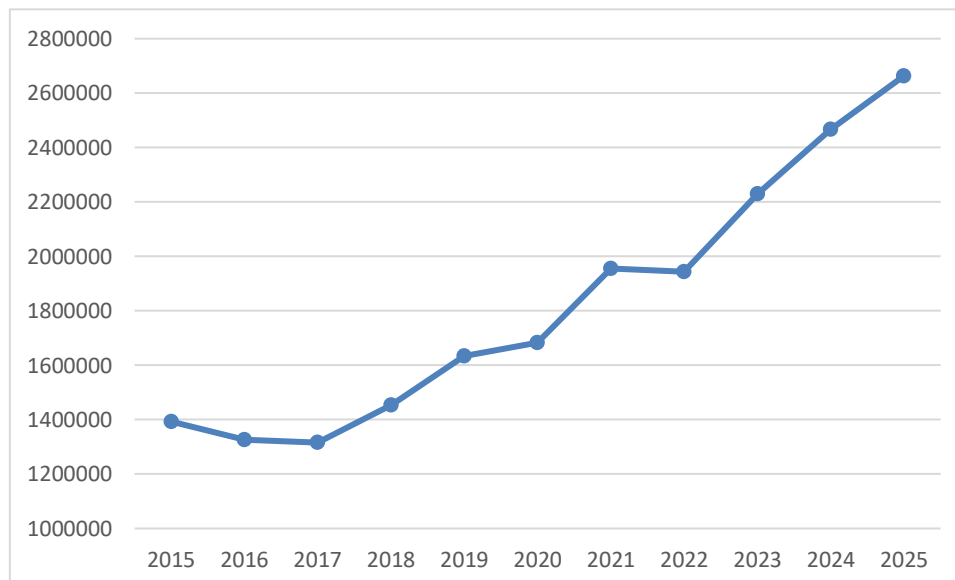
Kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dapat digambarkan melalui kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di Indonesia, meskipun terdapat kemajuan dalam berbagai sektor pembangunan, ketimpangan antar daerah masih menjadi persoalan yang mencolok. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi perlu mendapat perhatian lebih serius. Oleh karena itu, memahami keterkaitan antara ketiga variabel tersebut dan pengaruhnya terhadap IPM menjadi fundamental dalam merancang kebijakan yang lebih tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Nisa & Argyanti, 2025).

Pengeluaran sektor publik, terutama pendidikan dan kesehatan, memiliki hubungan erat dengan peningkatan kualitas manusia. Besarnya alokasi anggaran menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan manusia. Namun,

peningkatan belanja tersebut tidak selalu sejalan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di seluruh wilayah Indonesia (Palayukan, 2019). Peningkatan alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan tidak selalu berdampak langsung terhadap peningkatan IPM di sejumlah daerah, karena terdapat hal lain yang juga berpengaruh, seperti efektivitas penggunaan anggaran, kualitas implementasi kebijakan, besaran belanja modal, dan kemampuan menciptakan *multiplier effect* yang dapat mendorong pembangunan dan mengurangi ketimpangan (Mauliddiyah, 2021).

Masalah pembangunan manusia dan kemiskinan merupakan isu sentral dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat Indonesia. IPM sebagai indikator komposit yang mencakup dimensi pendapatan, pendidikan, dan kesehatan sangat dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan melemahkan daya beli masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pokok, mengenyam pendidikan, serta mengakses fasilitas kesehatan, hingga menghambat pertumbuhan produktivitas (Rachman, 2024) (Ulfatussaniah et al., 2024). Dalam situasi tersebut, belanja pemerintah menjadi instrumen fiskal yang sangat penting dalam mendukung pembangunan manusia melalui penyediaan infrastruktur dasar dan layanan publik, termasuk pendidikan dan kesehatan. Seperti diungkapkan Sapha & Akhyar, (2018), APBN menjadi instrumen utama untuk mendukung prioritas pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang.

Berikut adalah grafik yang menunjukkan perkembangan belanja pemerintah di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2025, yang diukur dalam milyar rupiah.



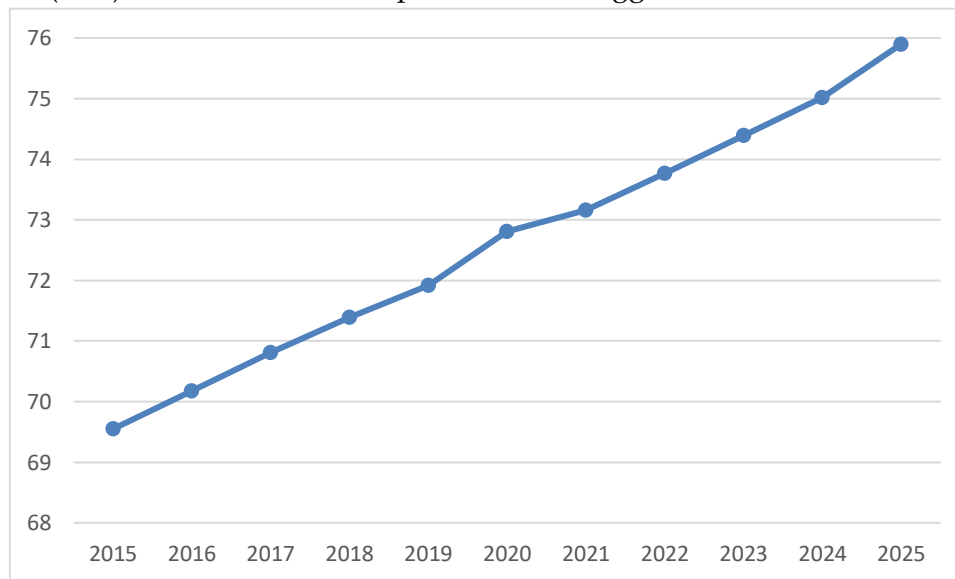
Grafik 1. Tren belanja pemerintah Indonesia (2015-2025)

Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS)

Grafik 1 tersebut menunjukkan pola yang berfluktuasi namun cenderung menguat pada akhir periode pengamatan. Pada tahun 2015 hingga 2017, belanja pemerintah mengalami penurunan, yang mengindikasikan adanya penyesuaian fiskal atau pengendalian anggaran. Selanjutnya, pada tahun 2018 terjadi peningkatan belanja yang cukup signifikan, meskipun kembali mengalami sedikit penurunan pada 2020.

Pada tahun 2021 belanja pemerintah mengalami kenaikan. Hal ini dapat dikaitkan dengan terjadinya Covid-19 dan upaya pemerintah untuk menanggulangnya, yang membuat belanja pemerintah meningkat. Pada tahun-tahun selanjutnya, belanja pemerintah relatif mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Peningkatan belanja pemerintah, apabila dialokasikan pada sektor-sektor produktif, dapat memperkuat kualitas hidup masyarakat yang tercermin melalui IPM. Namun sebaliknya, jika peningkatan belanja pemerintah tidak dialokasikan pada sektor-sektor yang tepat, hal tersebut akan menjadi penghambat meningkatnya nilai IPM. Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal melalui peningkatan belanja publik memiliki efek jangka panjang terhadap pembangunan manusia (Mauliddiyah, 2021). Nilai IPM yang meningkat seiring dengan meningkatnya anggaran belanja pemerintah, dapat menjadi indikasi bahwa anggaran belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah benar-benar mendorong adanya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini adalah grafik yang menggambarkan tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia selama periode 2015 hingga 2025



Grafik 2. Tren Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia (2015-2025)

Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS)

Grafik 2 memperlihatkan tren IPM Indonesia yang tumbuh secara stabil sepanjang 2015-2025, dari 69,55 menjadi 75,90, yang mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pembangunan manusia. Tren peningkatan nilai IPM dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa berbagai program pembangunan manusia yang dilaksanakan pemerintah, termasuk pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi, telah memberikan dampak nyata pada perbaikan kondisi hidup masyarakat. Selain itu, konsistensi peningkatan IPM yang sejalan dengan peningkatan belanja pemerintah mempertegas peran kebijakan fiskal sebagai instrumen penting dalam mendukung pembangunan manusia secara berkelanjutan di Indonesia (Antonius & Datus, 2024).

Berdasarkan Grafik 1, diketahui bahwa besaran nilai belanja pemerintah sangat fluktuatif, bahkan mengalami penurunan pada beberapa waktu. Namun, Grafik 2

menunjukkan bahwa nilai IPM terus meningkat dari waktu ke waktu, termasuk ketika anggaran belanja pemerintah mengalami penurunan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, seberapa besar anggaran belanja pemerintah dapat memengaruhi peningkatan nilai IPM di Indonesia? Oleh karena itu, salah satu tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadap peningkatan nilai IPM yang terdiri dari indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks kesejahteraan masyarakat.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas hubungan antara anggaran belanja pemerintah dengan nilai IPM. Penelitian dari Maulina & Andriyani (2020) Menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan, kesehatan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki dampak yang positif, kecuali pengeluaran di bidang pendidikan. Sementara Fajar & Indrawati (2020) Menyebutkan bahwa belanja pemerintah pada bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan serta fasilitas umum memberikan dampak positif terhadap nilai IPM. Adapun Oki et al. (2023) Beranggapan bahwa IPM terdiri dari unsur pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk perumahan dan fasilitas publik, serta jaminan sosial. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa belanja pemerintah untuk hal-hal tersebut berpengaruh positif terhadap peningkatan nilai IPM, kecuali belanja pada sektor kesehatan. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum memasukkan indeks ekonomi yang merupakan salah satu komponen penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat melalui IPM. Indeks ekonomi umumnya diwakili oleh tingkat pendapatan atau daya beli masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memasukkan komponen ekonomi dalam penelitian, disertai dengan komponen-komponen lain yang sesuai.

Sebagaimana diketahui, komponen penyusun IPM terdiri dari aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Maka, penelitian ini akan membahas tentang pengeluaran belanja pemerintah pada bidang-bidang tersebut. Belanja pemerintah di bidang pendidikan adalah belanja pemerintah yang dianggarkan untuk berbagai kepentingan di sektor pendidikan. Belanja pemerintah di bidang kesehatan adalah belanja pemerintah yang dianggarkan untuk berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan. Belanja pemerintah di bidang ekonomi, merupakan anggaran belanja pemerintah yang digunakan untuk peningkatan kesempatan kerja, nilai upah, dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, belanja pemerintah untuk perumahan dan fasilitas umum, serta perlindungan sosial terhadap IPM di Indonesia. Hal tersebut masih berkaitan dengan komponen ekonomi. Sebagaimana diketahui, ketersediaan perumahan, fasilitas publik yang memadai, serta jaminan sosial dapat berpengaruh terhadap nilai pendapatan dan tingkat daya beli masyarakat, yang merupakan salah satu komponen IPM.

Komponen IPM yang pertama adalah aspek pendidikan. Pendidikan dinilai sebagai komponen yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan. Sesuai

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, belanja pendidikan harus sekurang-kurangnya 20% sebagai upaya memperbaiki kualitas sumber daya manusia (Ulfatussaniah et al., 2024). Ketika belanja pemerintah di bidang pendidikan meningkat, diharapkan nilai IPM juga meningkat.

H0: Belanja fungsi pendidikan tidak berpengaruh terhadap IPM di Indonesia

H1: Belanja fungsi pendidikan berpengaruh terhadap IPM di Indonesia.

Komponen IPM yang selanjutnya adalah aspek kesehatan. Sektor ini sangat penting karena kesehatan adalah kebutuhan dasar. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika layanan kesehatan merupakan tanggung jawab negara. Tingkat kesehatan yang baik dapat berdampak pada kenaikan angka produktivitas, usia harapan hidup, dan kualitas kehidupan manusia. Oleh karena itu, belanja pemerintah di bidang kesehatan diharapkan dapat meningkatkan nilai IPM dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

H0: Belanja fungsi kesehatan tidak berpengaruh terhadap IPM di Indonesia

H1: Belanja fungsi kesehatan berpengaruh terhadap IPM di Indonesia.

Komponen IPM yang selanjutnya adalah komponen ekonomi. Belanja ekonomi berkaitan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Bandiyono, (2018) menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Maka, diperlukan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Sutono et al., (2022) serta (Apriska et al., 2024) menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dan nilai IPM, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi berpotensi memperkuat kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, belanja pemerintah di sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi memiliki peran penting dalam peningkatan nilai IPM.

H0: Belanja fungsi ekonomi tidak berpengaruh terhadap IPM di Indonesia

H1: Belanja fungsi ekonomi berpengaruh terhadap IPM di Indonesia.

Pada dasarnya, aspek ekonomi memiliki kompleksitas yang cukup besar. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, harus disertai dengan akses kepemilikan hunian yang mudah, ketersediaan fasilitas publik yang memadai, dan adanya jaminan sosial. Keynes menyebutkan bahwa intervensi pemerintah dalam penyediaan barang publik dan jaminan sosial dapat mengurangi ketimpangan dan mencegah terjadinya kegagalan pasar. Oleh karena itu penyediaan hunian layak serta penyediaan infrastruktur dasar merupakan tanggung jawab pemerintah (Suwarno & Nugrahaini, 2024). Firmansyah et al. (2024) menyatakan bahwa ketersediaan akses hunian dan fasilitas publik berpengaruh positif terhadap IPM, meskipun menurut Nofitri & Elvira, (2024) manfaat tersebut baru bisa dirasakan dalam jangka panjang, temuan tersebut juga sejalan dengan penelitian dari (Fajar & Indrawati, 2020).

H0: Belanja fungsi perumahan dan fasilitas umum tidak berpengaruh terhadap IPM di Indonesia

H1: Belanja fungsi perumahan dan fasilitas umum berpengaruh terhadap IPM di Indonesia.

Pembangunan manusia merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 34 ayat 1, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Indonesia,2009). Keberadaan jaminan dan perlindungan sosial yang memadai dapat menurunkan biaya transaksi dan berdampak pada nilai pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Perlindungan sosial mencakup bantuan pangan, tunai, pendidikan, dan kesehatan yang ditujukan bagi kelompok rentan (Alam et al., 2023). Najwa et al., (2024) Menemukan pengaruh positif karena perlindungan sosial membantu mengurangi risiko dan memutus rantai kemiskinan sebagaimana teori *Welfare State* yang dicetuskan oleh Keynes. Oleh karena itu, belanja pemerintah pada sektor pengadaan jaminan sosial dapat berpengaruh terhadap nilai IPM.

H0: Belanja fungsi perlindungan sosial tidak berpengaruh terhadap IPM di Indonesia

H1: Belanja fungsi perlindungan sosial berpengaruh terhadap IPM di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif berbasis data panel (2015–2023) pada 31 provinsi di Indonesia. Penggunaan data panel diharapkan dapat meningkatkan akurasi estimasi. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kesediaan data. Sebab data yang digunakan adalah data sekunder yang diterbitkan oleh pihak lain. Data belanja pemerintah diperoleh dari *Local Government Finance* (LGF) Kementerian Keuangan, sedangkan data IPM bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel utama meliputi IPM dan belanja modal, yang mencakup lima sektor: pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan & fasilitas umum, serta perlindungan sosial.

IPM merupakan alat ukur yang menilai tingkat pencapaian suatu daerah atau negara secara keseluruhan. Indikator ini mengintegrasikan capaian pada sektor pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan ekonomi. Dengan demikian, IPM tidak hanya menunjukkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menilai kualitas pembangunan manusia secara keseluruhan (Nabila et al., 2025). Penelitian ini menganalisis belanja pemerintah pada lima fungsi, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan fasilitas umum, serta perlindungan sosial. Seluruh variabel tersebut diukur dalam satuan rupiah sebagaimana satuan yang digunakan oleh pemerintah pada setiap akun belanja negara.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia, perlu dilakukan uji regresi yang dapat menggambarkan tingkat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Pada penelitian ini digunakan regresi linier berganda (*multiple regression*). Model regresi panel yang diaplikasikan untuk mengetahui Indeks Pembangunan Manusia diformulasikan dalam persamaan berikut:

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 LFP_{it} + \beta_2 LFK_{it} + \beta_3 LFE_{it} + \beta_4 LFPU_{it} + \beta_5 LFPS_{it} + e_{it}$$

Dimana:

β_0 = Konstanta

IPM_{it} = Indeks Pembangunan Manusia di provinsi i pada tahun t

LFP_{it} = Logaritma belanja pendidikan

LFK_{it} = Logaritma belanja kesehatan

LFE_{it} = Logaritma belanja ekonomi

$LFPFU_{it}$ = Logaritma belanja perumahan dan fasilitas umum

$LFPS_{it}$ = Logaritma belanja perlindungan sosial

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ dan β_5 = koefisien regresi $LP_{it}, LK_{it}, LE_{it}, LPUF_{it}$ dan LPS_{it}

e = *Error term*.

Dalam penelitian ini, belanja modal pada lima fungsi tersebut diubah ke bentuk logaritma. Transformasi ini bertujuan untuk mengurangi perbedaan skala antarvariabel, menstabilkan varians, serta meningkatkan konsistensi hasil estimasi baik secara statistik maupun relevansi ekonomi. Dalam analisis regresi data panel pada penelitian ini, tiga model yang umum digunakan adalah common effect, fixed effect, dan random effect. Untuk menentukan model yang paling sesuai, dilakukan beberapa pengujian. Chow test dilakukan untuk menilai perbedaan antara common effect dan fixed effect, Hausman test dilakukan untuk memilih antara *fixed effect* dan *random effect*, sedangkan Lagrange Multiplier (LM) test membandingkan common effect dengan random effect. Serangkaian uji ini memastikan bahwa model yang dipilih dapat memberikan hasil estimasi yang konsisten dan akurat dalam menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia (IPM) (Muliadi & Amri, 2019).

HASIL

Ringkasan statistik terdapat pada Tabel 1, yang merupakan gambaran deskriptif dari masing-masing variabel yang digunakan pada penelitian ini, yaitu belanja pemerintah pada sektor pendidikan (FP), kesehatan (FK), ekonomi (FE), perumahan dan fasilitas umum (FPFU), perlindungan sosial (FPS), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Statistik ini mencakup nilai rata-rata, nilai tertinggi dan terendah, simpangan baku, serta jumlah pengamatan untuk setiap variabel. Informasi ini memberikan gambaran awal mengenai distribusi data dan tingkat variasi, baik antar wilayah maupun antar periode waktu. Statistik deskriptif merupakan landasan awal dalam analisis empiris untuk memahami pola alokasi belanja pemerintah pada berbagai sektor serta kaitannya dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia.

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif

Parameter statistik	IPM (Poin)	Belanja berdasarkan fungsi (Rp per kapita)				
		Fungsi Pendidikan	Fungsi Kesehatan	Fungsi layanan ekonomi	Fungsi perumbahan & fasilitas umum	Fungsi perlindungan sosial
Mean	71,18	60.083,25	34.801,30	73.842,88	119.913,33	2.176,22
Maks	83,55	573.501,85	286.336,25	1.600.774,12	1.364.038,21	129.031,58
Min	57,25	162,97	347,46	561,46	7,00	0,45
Obs	279	279	279	279	279	279

Sumber: hasil kalkulasi peneliti menggunakan Eviews, 2025.

Nilai rata-rata IPM sebesar 71,18 dengan standar deviasi 4,36 mengindikasikan bahwa tingkat pembangunan manusia antar daerah relatif stabil dengan disparitas yang tidak terlalu besar. Namun, seluruh variabel belanja pemerintah menunjukkan variasi yang sangat tinggi. Belanja fungsi pendidikan rata-rata Rp 60.083,25 per kapita dengan maksimum Rp 573.501,85 dan standar deviasi Rp 61.897,14, sedangkan belanja fungsi kesehatan rata-rata Rp 34.801,30 dengan maksimum Rp 286.336,25 serta standar deviasi Rp 33.185,73 mencerminkan ketimpangan alokasi anggaran yang cukup signifikan. Belanja fungsi ekonomi memiliki rata-rata Rp 73.842,88 tetapi mencapai maksimum Rp 1.600.774,12 dan standar deviasi Rp 160.754,68 menunjukkan ketimpangan sangat besar antar daerah. Hal serupa terlihat pada belanja fungsi perumahan dan fasilitas umum yang memiliki rata-rata Rp 119.913,33 nilai maksimum Rp 1.364.038,21 dan standar deviasi tertinggi yaitu Rp 202.126,09 sehingga menggambarkan perbedaan kemampuan fiskal yang sangat lebar. Sementara itu, belanja fungsi perlindungan sosial memiliki rata-rata sangat rendah yaitu Rp 2.176,22 dengan variasi besar (maksimum Rp 129.031,58 dan standar deviasi Rp 8.960,45), menunjukkan bahwa sebagian besar daerah belum memprioritaskan sektor ini. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa meskipun IPM cenderung stabil, ketimpangan pengeluaran pemerintah antar daerah sangat tinggi dan dapat berimplikasi pada kesenjangan kualitas pelayanan publik serta pembangunan manusia.

Pemilihan Model Regresi Panel

Analisis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan data panel untuk menilai pengaruh belanja pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, dengan tiga model yang diuji: *common effect* (CEM), *fixed effect* (FEM), dan *random effect* (REM). Pemilihan model terbaik dilakukan melalui *Chow test* untuk membandingkan CEM dan FEM, serta *Hausman test* untuk memilih antara FEM dan REM, agar hasil estimasi konsisten dan relevan secara ekonomi. *Chow test* digunakan untuk menentukan model yang tepat antara *common effect* dan *fixed effect* dengan melihat *p-value* dari *cross-section F*. Jika *p-value* > 0,05, model *common effect* dipilih, sedangkan jika *p-value* < 0,05, model *fixed effect* yang lebih sesuai. Hasil uji ini ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Chow Test

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	90.519093	(30,243)	0.0000
Cross-section Chi-square	697.332830	30	0.0000

Sumber: Eviews, 2025.

Hasil Uji Chow pada Tabel 2 menunjukkan bahwa p-value cross-section F sebesar 0,000, yang jauh lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Hal ini menandakan adanya perbedaan signifikan antarprovinsi dalam data panel, sehingga model *fixed effect* (FEM) lebih tepat digunakan dibandingkan dengan *common effect model* (CEM). Dengan kata lain, FEM mampu menangkap karakteristik khusus masing-masing provinsi yang tidak dapat dijelaskan oleh CEM, sehingga estimasi pengaruh belanja pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia menjadi lebih akurat dan relevan secara regional

Pada Tabel 3 menunjukkan bagaimana pemilihan model antara *fixed effect* dan *random effect* ditentukan. Nilai p-value dari *cross-section* random menjadi acuan utama: apabila p-value lebih besar dari 0,05, *random effect model* (REM) dianggap layak digunakan karena estimasinya konsisten dan efisien. Sebaliknya, jika p-value kurang dari 0,05, *fixed effect model* (FEM) lebih tepat karena dapat menangkap karakteristik khusus tiap provinsi yang tidak dijelaskan oleh REM. Dengan demikian, *Hausman test* memastikan model yang dipilih memberikan estimasi yang paling sesuai dan akurat untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

Tabel 3
Hasil Hausman test

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.059614	5	0.0736

Sumber: Eviews, 2025.

Berdasarkan hasil pada Tabel 3, diperoleh nilai statistik *Chi-square* sebesar 10,059614 dengan nilai *p*- Berdasarkan Tabel 3, nilai statistik *Chi-square* tercatat sebesar 10,059614 dengan *p-value* 0,07. Karena *p-value* melebihi 0,05, model yang paling tepat digunakan adalah *random effect model* (REM). Dengan demikian, analisis pengaruh belanja pemerintah terhadap IPM dilakukan menggunakan REM, yang mampu memberikan estimasi yang lebih stabil dan efisien.

Uji Asumsi Klasik

Dalam analisis regresi, Asumsi klasik diuji agar model memberikan hasil estimasi yang valid, tidak memihak, dan dapat diandalkan secara statistic. Terdapat beberapa uji penting dalam asumsi klasik, antara lain uji normalitas residual untuk memastikan bahwa kesalahan (*error*) model terdistribusi normal, uji multikolinearitas untuk mendeteksi adanya hubungan yang terlalu kuat antarvariabel independen, uji heteroskedastisitas untuk memeriksa apakah varians residual konstan di seluruh observasi, serta uji autokorelasi untuk memeriksa keterkaitan antar residual pada waktu yang berbeda. Meski demikian, pengujian dalam penelitian ini terbatas pada

normalitas residual, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasilnya disajikan secara singkat dalam tabel berikut untuk memastikan validitas dan reliabilitas model regresi.

Tabel 4.
Uji Normalitas Residual

Jarque-Bera	20,27075 (0,000)
-------------	---------------------

Sumber: Eviews, 2025.

Berdasarkan Tabel 4, nilai Jarque-Bera tercatat memiliki probabilitas 0,000. Artinya residual model tidak mengikuti distribusi normal sebab acuan nilai Jarque-Bera adalah data terdistribusi normal apabila nilai probabilitasnya $> 0,05$. Meski demikian, ketidaknormalan residual tidak selalu menimbulkan masalah signifikan pada regresi data panel, karena koefisien estimasi tetap konsisten jika asumsi lain dipenuhi.

Tabel 5.
Uji Autokorelasi: Durbin-Watson (DW Test)

Durbin-Watson	(1,02)
---------------	--------

Sumber: Eviews, 2025.

Selanjutnya, pada Tabel 5 hasil uji *autokorelasi* melalui *Durbin-Watson (DW) test* menunjukkan nilai sebesar 1,02 yang menunjukkan adanya indikasi kuat autokorelasi positif dalam model. Model regresi dapat dianggap bebas dari autokorelasi apabila nilai *Durbin-Watson (DW) test* berkisar antara 1,5-2,5. Kehadiran *autokorelasi* dapat menurunkan efisiensi estimasi dan menyebabkan kesalahan standar menjadi bias, sehingga pengujian hipotesis menjadi kurang valid. Namun, karena, nilai DW lebih dari 1 tingkat autokorelasi dapat dianggap rendah atau diabaikan. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa efektivitas belanja pemerintah dalam meningkatkan IPM berbeda-beda antarsektor, sehingga diperlukan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih tepat sasaran agar belanja publik benar-benar mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

Tabel 6.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

LFP	(0,72)
LFK	(0,33)
LFE	(0,59)
LFPFU	(0,88)
LFPS	(0,30)

Sumber: Eviews, 2025.

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa *p-value* untuk semua variabel independen lebih besar dari 0,05, yaitu: pendidikan (0,72), kesehatan (0,33), ekonomi (0,59), perumahan & fasilitas umum (0,88), dan perlindungan sosial (0,30). Hal ini menandakan tidak ada masalah heteroskedastisitas, artinya varians residual konstan di

seluruh pengamatan. Sehingga, model regresi yang digunakan memiliki efisiensi dan estimasinya dapat dipercaya untuk tahap analisis selanjutnya.

Hasil Estimasi Regresi Panel

Penelitian ini menggunakan regresi data panel untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah pada pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan fasilitas umum, serta perlindungan sosial terhadap IPM di Indonesia. Hasil estimasinya disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7
Hasil pemilihan regresi linier

	<i>Random Effect</i>		
	<i>koefisien estimasi</i>	<i>T Stat</i>	<i>P-Value</i>
C	65,68	40,59	0,0000
LP	0,81	10,68	0,0000
LK	-0,53	-3,99	0,0001
LE	0,57	7,91	0,0000
LPFU	-0,10	-2,77	0,0059
LPS	-0,39	-5,97	0,0000
R ²	0,52		
Udj. R ²	0,51		
F-stat	59,41		
Prob(Fstat)	0,000		
DW-stat	1,02		

Sumber: Eviews, 2025.

Persamaan pengaruh belanja pemerintah pada 5 sektor berdasarkan Tabel 7, dapat dituliskan sebagai berikut:

$$IPM_{it} = 65,68 + 0,81 LFP_{it} - 0,53LFK_{it} + 0,57LFE_{it} - 0,10 LFPFU_{it} - 0,39LFPS_{it} + \epsilon_{it}$$

PEMBAHASAN

Tabel 7 menunjukkan bahwa sebagian besar belanja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap IPM di Indonesia. Belanja pada sektor pendidikan (LFP) memberikan pengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 0,81 (p-value 0,000), yang berarti setiap peningkatan belanja pemerintah sebesar 1 satuan dapat meningkatkan nilai IPM sebesar 0,81 persen. Hal ini sesuai dengan teori, di mana pendidikan merupakan salah satu komponen IPM. Peningkatan belanja pendidikan dapat meningkatkan nilai IPM, yang artinya, pada variabel ini H0 ditolak dan H1 diterima. Belanja pemerintah di bidang pendidikan meliputi bantuan dana operasional pendidikan, bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat miskin, penyediaan fasilitas dan revitalisasi infrastruktur pendidikan, serta pemberian gaji pendidik. Sinergitas berbagai hal tersebut, dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tentu berdampak pada peningkatan nilai IPM. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajar & Indrawati (2020) yang juga

menyebutkan bahwa belanja pemerintah di bidang pendidikan dapat meningkatkan nilai IPM.

Sedangkan, belanja pada sektor kesehatan (LFK) menunjukkan pengaruh negatif signifikan dengan koefisien $-0,53$ (p-value $0,0001$). Artinya, setiap kenaikan belanja pemerintah sebesar 1 satuan akan berdampak pada penurunan nilai IPM sebesar $0,53$ persen. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa peningkatan belanja di sektor kesehatan (salah satu komponen IPM) dapat meningkatkan nilai IPM. Maka, pada variabel ini dapat dinyatakan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian dari Palenewen, et. al (2018) yang menyatakan bahwa belanja pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh negatif terhadap IPM. Hal ini dapat terjadi karena adanya ketidakselarasan antara kebutuhan masyarakat dan alokasi belanja bidang kesehatan. Besarnya anggaran belanja bidang kesehatan, tidak sepenuhnya digunakan untuk penyediaan obat-obatan ataupun peningkatan fasilitas dan aksesibilitas layanan, namun bisa jadi digunakan untuk hal-hal yang sifatnya administratif dan tidak berdampak terhadap peningkatan kesehatan secara langsung.

Belanja ekonomi (LFE) menunjukkan hasil berpengaruh positif signifikan dengan koefisien $0,57$ (p-value $0,000$), menandakan bahwa setiap peningkatan belanja ekonomi sebesar 1 satuan, dapat mendukung peningkatan IPM sebesar $0,57$ persen melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan produktivitas. Dapat disimpulkan bahwa pada variabel ini, H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian dari Apriska et al. (2024). Pertumbuhan ekonomi, artinya pertumbuhan pada berbagai sektor di kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dapat memberikan dampak besar terhadap peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat, sehingga dapat mendorong peningkatan nilai IPM. Oleh karena itu, peningkatan belanja pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi dapat berdampak positif terhadap nilai IPM. Belanja pemerintah pada bidang ini berkaitan dengan upaya pemerintah untuk menyediakan infrastruktur dan fasilitas pendukung untuk investasi, peningkatan kapasitas produksi, dan kemudahan membuka usaha.

Sementara itu, belanja fungsi perumahan dan fasilitas umum (LFPFU) menunjukkan pengaruh negatif signifikan dengan koefisien $-0,10$ (p-value $0,0059$). Artinya, setiap kenaikan belanja pemerintah pada sektor ini, dapat menurunkan IPM sebesar $0,10$ persen. Artinya, H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa ketersediaan fasilitas publik tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap kondisi pendidikan, kesehatan, ataupun ekonomi masyarakat Indonesia sehingga belanja pemerintah pada penyediaan perumahan dan fasilitas publik, pada akhirnya tidak membuat nilai IPM mengalami peningkatan. Nilai IPM justru dapat mengalami penurunan ketika belanja pemerintah di bidang ini semakin meningkat, karena adanya kemungkinan terjadinya relokasi anggaran belanja. Peningkatan belanja pemerintah pada sektor ini memotong belanja pemerintah pada bidang lain yang dapat berhubungan langsung dengan nilai IPM seperti anggaran

pendidikan atau kesehatan. Sehingga, peningkatan belanja pemerintah di bidang ini pada akhirnya justru menurunkan nilai IPM.

Demikian pula, belanja fungsi perlindungan sosial (LFPS) menunjukkan pengaruh negatif signifikan dengan koefisien $-0,39$ (p -value $0,000$) yang dapat diartikan bahwa setiap kenaikan belanja pemerintah sebesar 1 satuan pada sektor ini, akan menurunkan nilai IPM sebesar $0,39$ persen. Artinya, hasil penelitian pada variabel ini adalah menerima H_0 dan menolak H_1 . Kondisi ini kurang lebih sama dengan mekanisme belanja pemerintah pada bidang perumahan dan penyediaan fasilitas publik. Oleh karena itu, peningkatan belanja pemerintah pada sektor ini memiliki dampak yang sama dengan sektor perumahan dan penyediaan fasilitas publik. Penyediaan jaminan sosial yang tidak tepat sasaran dan mekanisme penyelenggaraan yang tidak adil, pada akhirnya justru membuat kondisi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat terganggu sehingga nilai IPM mengalami penurunan.

Hasil estimasi model *random effect* menunjukkan bahwa R^2 sebesar $0,52$ dan adjusted R^2 sebesar $0,51$, yang berarti sekitar 51 persen variasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dijelaskan oleh belanja pemerintah di bidang-bidang yang ada di model ini, sedangkan sekitar 49 persen lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat di dalam model. Selain itu, nilai F -statistic sebesar $59,41$ dengan p -value $0,000$ mengindikasikan bahwa secara simultan, seluruh variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Dapat diartikan bahwa variabel-variabel yang terdapat pada model ini masih mendominasi penetapan nilai IPM, meskipun masih terdapat faktor lain yang juga berpengaruh cukup besar dalam membentuk nilai IPM. Namun, secara garis besar dapat dipahami bahwa belanja pemerintah pada sektor-sektor tersebut akan berdampak terhadap pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah pada sektor pendidikan dan ekonomi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia selama periode 2015 – 2023 . Sebaliknya, belanja pada sektor kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, serta perlindungan sosial menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan, yang mengindikasikan adanya ketidakefisienan atau ketidaktepatan sasaran alokasi anggaran pada sektor-sektor tersebut. Temuan ini mengindikasikan adanya ketidakefisienan dan ketidaktepatan sasaran dalam alokasi belanja publik di beberapa sektor, sehingga dampaknya terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia menjadi terbatas. Secara empiris dan teoretis, temuan ini menegaskan bahwa kualitas pengelolaan belanja lebih menentukan dibandingkan besaran anggaran, sementara secara ekonomi belanja pendidikan dan ekonomi berperan sebagai investasi produktif, berbeda dengan sektor lain yang berdampak jangka panjang. Keterbatasan penelitian ini terletak pada indikasi *autokorelasi* dan

belum dimasukkannya variabel sosial ekonomi lain, sehingga penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode yang lebih robust dan variabel kontrol tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, M. F., & Rejekiningsih, T. W. (2025). *ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI 34 PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2017-2021 (Doctoral dissertation, UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis)*.
- Alam, A. Z. I., Zaid, M., & Alam, A. A. F. (2023). Digitalisasi Sistem Perlindungan Sosial Kebijakan di Indonesia sebagai Langkah Menuju Masyarakat 5.0. *Journal Social Society*, 3(2), 95–112. <https://doi.org/10.54065/jss.3.2.2023.335>
- Antonius, M., & Datus, D. (2024). *THE INFLUENCE OF GOVERNMENT EXPENDITURE ON THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN NTT PROVINCE*. 9(1), 109–119. <https://doi.org/10.20473/jiet.v9i1.57397>
- Apriska, L., Irwan, M., Suprpti, I. A. P., & Anggara, J. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB). *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 10(1), 1–11. <https://doi.org/10.29303/jseh.v10i1.451>
- Bandiyono, A. (2018). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Fungsi Terhadap Peningkatan Ipm Dan Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Info Artha*, 2(1), 11–28. <https://doi.org/10.31092/jia.v2i1.235>
- Fajar, M. A., & Indrawati, L. (2020). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Perumahan Dan Fasilitas Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur). *Indonesian Accounting Reasearch Journal*, 1(1), 108–118.
- Firmansyah, M. F., Rizqulloh, M. I., Hadian, Y., & Nugraha, A. S. (2024). *Fiscal Policy Instruments and Human Development Index : Efforts to Improve the Welfare for Indonesian*. <https://doi.org/10.32734/ljisp.v3i1.15772>
- Maharda, J. B., & Aulia, B. Z. (2020). *GOVERNMENT EXPENDITURE DEVELOPMENT IN INDONESIA AND*. 2(2), 81–94.
- Mauliddiyah, N. L. (2021). Dampak Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Dan Infrastruktur. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 6.
- Maulina, U., & Andriyani, D. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Tpk Terhadap Ipm Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 9(1), 34. <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v9i1.3171>
- Nabila, Z., Balqis, P., & Nurhadi, B. (2025). *Dampak jumlah penduduk , upah minimum dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan : Peran ZIS sebagai variabel moderasi di Jawa Tengah*. 5(1), 61–72.
- Najwa, Y., Amanda, P. D., Fatmawati, F., Al-Kalam, S., & Wahyudi, S. N. (2024). Analisis Efektivitas Program Perlindungan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Rentan di Indonesia. *Al-I'timad: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.35878/alitimad.v2i1.1131>
- Nisa, K., & Argyanti, T. (2025). *Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi Analisis Pemodelan Regresi Linear dengan Sebaran Distribusi Gamma : Hubungan antara Pendidikan , Kesehatan , dan Ekonomi Terhadap*. 2(1), 127–134.
- Nofitri, F. D., & Elvira, R. (2024). *Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia Di Pulau Sumatera Tahun 2019 – 2023*. 9, 138–155.
- Oki, A., Wiratmoko, T., & Purwanti, L. (2023). *IMPACT OF GOVERNMENT*

EXPENDITURE ON HUMAN. 6(43).

- Palayukan, M. (2019). Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 12(2), 74-91. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v12i2.376>
- Palenewen, T.O.M, Walewangko, E.N., & Sumual J.I. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap IPM dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 18(04).
- Rachman, A. M. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan di Indonesia. *Bulletin of Community Engagement*, 4(1), 277-288.
- Sapha, D., & Akhyar, Q. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Publik dan Tenaga Kesehatan Terhadap Derajat Kesehatan Masyarakat di Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(4), 776-784.
- Sultan, Rahayu, H. C., & Purwiyanta. (2023). Analisis Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5, 75-83. <https://doi.org/10.37034/infec.v5i1.198>
- Sutono, I. A., Perbendaharaan, D. J., & Keuangan, K. (2022). *Pengaruh belanja pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi riau*. 3, 150-168.
- Suwarno, N. P. M., & Nugrahaini, F. T. (2024). Identifikasi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan di Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. ...) *Seminar Ilmiah Arsitektur*.
- Ulfatussaniah, A., Murwiati, A., & Wahyudi, H. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Kesehatan , Pendidikan , Infrastruktur dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten / Kota di Tiga Provinsi Termiskin di Pulau Sumatera. *Journal on Education*, 06(03), 16720-16729.